



SIKLUS UMRAN /PERADABAN

**Burhanuddin Al-Butary, Gita Ayu Pratama,
Muhammad Zauki Hafiezh,
Yafika Apriliza**

Al-Bustary Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
burhanuddin@u naw.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karya Ibnu Khaldun pemikirannya tentang epistemologi terkait perkembangan peradaban manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun tentang perkembangan peradaban manusia yang membandingkannya dengan sumber lain terkait pembahasan yang sama. Kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan tentang epistemologi peradaban manusia. Dari kajian ini dapat diketahui bahwa pada prinsipnya peradaban manusia menurut Ibnu Khaldun adalah realisasi asabiah untuk menciptakan pembangunan manusia dan kelembagaan. Kemakmuran peradaban tersebut mesti memenuhi tiga kriteria Pertama, masyarakat beragama dan berakhlak mulia. Kedua, masyarakat yang bekerjasama dan bersatu padu. Ketiga, pemerintahan yang adil dan saksama.

Kata kunci: Ibnu Khaldun, Asabiah, peradaban.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the work of Ibn Khaldun, his thoughts on epistemology related to the development of human civilization. The method used in this study is library research, which examines Ibn Khaldun's thoughts on the development of human civilization by comparing them with other sources related to the same discussion. Then it is analyzed to obtain a conclusion about the epistemology of human civilization. From this study it can be seen that in principle human civilization according to Ibn Khaldun is the realization of asabiah to create human and institutional development. The prosperity of this civilization must meet three criteria. First, a religious community and noble character. Second, people who work together and unite. Third, just and thorough government.

Keywords: Ibnu Khaldun, Asabiah, civilization.

Pendahuluan

Manusia dan peradaban merupakan perwujudan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti yang sempurna. Keyakinan yang mendasar bagi manusia adalah untuk membentuk peradaban, membuat dunia menjadi lebih baik. Seharusnya manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bergerak lincah sedemikian rupa untuk menjadikan alam beserta isinya sebagai objek yang menjadi ladang bagi gerak dalam membangun peradaban. Peradaban berbasis komunitas adalah dengan mengedepankan manusia, terjadinya solidaritas antar sesama manusia untuk mensupport kegiatan manusia dan memenuhi kebutuhannya. Komunitas memiliki arti yang sangat luas, baik komunitas tradisional (desa) maupun modern (kota).

Konsep inilah yang dinilai oleh Ibnu Khaldun dalam pemikiran asabiah-nya. Komunitas diartikan secara luas, baik tradisional maupun komunitas modern. Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai "Umran Badawi (*Bedouin culture*) dan "Umran hadhiri (*civic culture*). Jika dikaitkan dengan peradaban manusia maka asabiah akan ada pada dua komunitas peradaban yaitu peradaban Badawi (komunitas tradisional) dan peradaban hadhiri (komunitas modern). Ibnu Khaldun menjelaskan manusia tidak akan mampu hidup untuk sendiri, dia akan membutuhkan orang lain dan dia akan maju berkembang ke arah yang lebih rasional. Perkembangan peradaban manusia pada dasarnya ia bergerak dari "Umran badawi (*Bedouin culture*) menuju "Umran hadhiri (*civic culture*) secara alamiah, karena pada diri manusia memiliki orientasi kehidupan/kebutuhan. Orientasi manusia ini didasari oleh dua aspek yaitu pertama. Fikir (Intelektualitas), aspek yang menyebabkan manusia berbeda dengan binatang. Dan kedua. Al-hayawaniyyah wa alghidza"iyyah (aspek kehewanatan serta nutrisi). Dalam karyanya Ibnu Khaldun menuliskan perkembangan manusia menjadi dua: pertama, Tatamad dan Al-Madinah: Masyarakat yang belum mencapai suatu kematangan, cenderung untuk memusatkan diri pada usaha untuk mencukupi kebutuhan, yaitu mengusahakan bahan pokok pangan (alaqwat). Tanda peradaban manusia dalam perkembangan ini adalah "Umran badawi atau komunitas tradisional, dimana masyarakatnya bersikap kesederhanaan, kebebasan, persamaan, keberanian spontan, kegembiraan, dan kohesifitas. Kedua, Al-Kamalat Min Al- Ma"ash:

Masyarakat hidup, kota-kota maju, sejumlah bidang pekerjaan(al-a`mal) mulai muncul, maka pelan-pelan mereka akan mulai memanfaatkan surplus kekayaan yang ada (al-za`id). Pada perkembangan ini manusia di identikan dengan “Umran hadhari (*civic culture*) atau komunitas modern, dimana manusia bersifat kompleksitas, pembatasan (*restriksi*), pembedaan (*inequality*), menahan diri (*inhabitation*), kecanggungan (*clumsiness*) dan interest pribadi (*self-interest*). Perubahan sosial masyarakat mengarah pada ciri-ciri kehidupan hadhari. Tetapi pencapaian hadharah juga merupakan awal kejatuhan masyarakat secara etis, yang kemudian menjadi kejatuhan secara sosial-material. Kebutuhan manusia untuk memenuhi tuntutan aspek yang kedua ini biasanya lebih mendesak, dan karena itu harus didahulukan, ketimbang tuntutan aspek yang pertama.

Metode

Dalam kajian ini, metodologi yang digunakan studi kepustakaan. Selain itu, penulis juga melakukan kajian literatur terhadap beberapa artikel tentang ashabiayah dan peradaban manusia dari Ibnu Khaldun. Untuk selanjutnya, penulis menganalisis dari hasil kajian sebelumnya tentang Ibnu Khaldun dan mencari pola Ashabiayah sebagai model perkembangan peradaban manusia dalam pandangan Ibnu Khaldun.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Al-Umran/Peradaban

Kata *umran* berasal dari bahasa Arab amara yang berarti mendiami menghuni, bertumbuh, meningkat, membangun, berkembang maju, dan makmur. Dalam konteks Ibnu Khaldun, *umran* ini merupakan salah satu kajian yang diperkenalkan dalam Muqadimmahnya. Salah satu penulis histografi, Jesteru, memberikan pendekatan analisis dan tafsiran yang menghasilkan gagasan jelas tentang falsafah sejarah yang hanya mampu dilakukan oleh Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah. Gagasan tersebut adalah *umran* atau kemakmuran sejagat yang boleh didefinisikan sebagai satu cetusan signifikan dan genesis penting dalam kemunculan disiplin falsafah sejarah

Islam (Mahayudin2011). Ibnu Khaldun menegaskan bahwa: *Al-Umran* adalah ilmu yang mandiri terpisah dari semua ilmu karena ia membahas mengenai sifat-sifat dasar kenyataan alamiah yang nampak. Di dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengasaskan bahwa *Umran* disifatkan sebagai ilmu tersendiri merupakan suatu asas yang berupaya mengungkapkan fenomena kemanusiaan, sosial dan tamadun manusia.

2. Konsep Al-Umran Menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya adalah hubungan kepemilikan, Pemerintah adalah milik rakyat, begitu pula sebaliknya rakyat adalah milik pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian perbuatan hukum yang telah terorganisir dengan baik. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun berkenaan dengan ilmu *Al-Umran* menyatakan bahwa organisasi sosial apapun harus memiliki seorang yang memiliki pengaruh kepada mereka. Peraturan kadang didasarkan pada syariat. Mereka diwajibkan tunduk pada hukum berdasarkan keyakinan pengatur akan pahala dan dosa yang ditimpakan kepada mereka di akhirat kelak. Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa *al-umran* adalah ilmu yang mandiri terpisah dari semua ilmu karena ia membahas mengenai sifat-sifat dasar kenyataan alamiah yang nampak. Jika ada bangsa lain selain Yunani, seperti bangsa Persia, Chaldean, Syria, Babylonia, atau Mesir yang pernah melakukan kajian seperti ini, maka kajian mereka tidak sampai pada telinga orang Islam (dalam Riyadi, 2018).

Melalui konsep *umran*, Ibnu Khaldun menganalisis prinsip sejarah yaitu perubahan masyarakat, yang menerangkan bahawa sifat masyarakat itu tidak statik, tetapi bergerak dan berkembang daripada kelompok yang kecil kepada kelompok yang lebih besar. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi pembangunan Islam ditemukan dalam karyanya yang berjudul *Muqaddimah*. Istilah pembangunan ini mengacu pada "*umran alalam*" atau memakmurkan dunia. Istilah "*umran al-alam*" dibentuk dari tiga komponen yaitu sejarah (*tarikh*), kerjasama masyarakat (*al-ijtima` al- insani*) dan alam semesta (Tohir, 2014). Kehidupan mengalami perputaran sejarah, termasuk peradaban. Dimulai dari fase lahir, kemudian tumbuh, dewasa (*mature*), stagnan, menurun karena tua, dan akhirnya mati (*decline*). Secara singkat dapat dikatakan bahwa al-Umran

mencakup dua hal, yaitu *human association* (asosiasi manusia) dan *civilization* (kebudayaan).

3. Konsep Al-Umran dalam bidang ekonomi

Dalam dunia ekonomi, perniagaan, tanah perkebunan dan pertanian, kaum kapitalis dari kalangan penduduk kota membutuhkan proteksi dan wibawa. Kebanyakan kebijakan pemerintah tidak adil, karena keadilan yang murni hanya didapat dalam khilafiah yang legal, yaitu khilafiah syariah, yang jarang diwujudkan. Ibnu Khaldun menulis bahwa perdagangan raja akan merusak perdagangan rakyat dan akhirnya mengecilkan pendapatan pajak. Adapun beberapa penyebabnya yaitu:

- a. Pertama, kompetisi Raja dengan rakyat terjadi tidak seimbang karena perbedaan modal antara raja dan rakyat yang berdagang.
- b. Raja kadangkala memaksa para pedagang untuk menjual dagangannya dengan harga murah atau dengan merampas tanpa imbalan apapun.
- c. Produksi pertanian dan kerajinan seperti sutra, jagung, madu, gula dan lain-lain dipaksakan untuk dibeli oleh rakyat karena desakan kebutuhan negara.
- d. Barang dagangan raja bebas dari pajak dan bea-cukai. Maka pola bisnis negara secara berlebihan, akan memberikan implikasi destruktif bagi peradaban (*umran*) dan mengancam disintegrasi bangsa. Seharusnya raja meningkatkan pendapatannya cukup dari pajak, bukan dengan melakukan perdagangan.

Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa *umran*, kesejahteraan, dan kemakmuran perdagangan bergantung kepada produktifitas dan usaha manusia dalam semua arah. Rakyat akan berpencar ke seluruh pelosok daerah untuk mencari penghidupan. Sehingga ketidakteraturan status raja dalam sebuah negara muncul dan mengakibatkan disintegrasi. Ketika pilar *umran* (peradaban) ini hancur juga, maka semua bangunan akan hancur pula.

Dalam ranah ekonomi, negara seharusnya bisa memberikan motivasi kepada individu untuk terus berusaha dalam lapangan ekonomi, dengan memberikan batasan dan norma hukum tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Negara tidak

diperkenankan melakukan pembatasan terhadap usaha-usaha *cultural* atau swasta dengan pembebanan pajak atau bea cukai. Dalam kaitannya dengan hal ini Ibnu Khaldun menulis bahwa pajak pada era raja menjadi hal yang sepihak, tanpa ada persetujuan dari rakyat. Karena fase kemewahan telah dicapai, maka pajak kemudian ditingkatkan dengan kebutuhan negara yang semakin kompleks. Sehingga usaha-usaha kultural lenyap sebagai pengganti pajak yang tidak seimbang dengan pendapatan rakyat. Akhirnya peradaban (*umran*) hancur atas lenyapnya perangsang untuk melakukan aktifitas-aktifitas kultural. Padahal pendorong paling kuat bagi aktifitas kultural atau swasta adalah mengadakan pengurangan sebisa mungkin atas jumlah kewajiban yang dipungut dari orang-orang yang andil dalam usaha-usaha kultural.

Ketegasan dalam wilayah hukum bagi Ibnu Khaldun akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, bagi Ibnu Khaldun kearifan dan kebijaksanaan dalam menjembatani ketegasan menjadi hal yang tepat demi terwujudnya pembangunan ekonomi oleh negara dan masyarakat sebagai pilar utama *umran*. Tanpa ini semua, maka kezaliman, baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat akan lahir, dan akan berujung pada hancurnya peradaban secara bersama-sama. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang hukum dalam pembangunan ekonomi negara diatas menemukan relevansi nya dengan konsep demokrasi ekonomi-politik yang harus dijalankan baik oleh negara maupun masyarakat. Keterbukaan negara dan peran aktif masyarakat menjadi titik tekanannya. Di sisi lain, penegakan hukum juga bisa diarahkan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi dan untuk memotivasi masyarakat agar tetap bekerja dalam wilayah produksi masing- masing.

4. Pengaruh Dasar Intelektual dalam Membangun Peradaban

Jika diamati, peradaban manusia sepanjang perjalanannya sangat kental dengan dasar logika mereka. Peradaban Yunani yang dasar logikanya adalah kemampuan berfikir, dalam perjalanannya melahirkan peradaban ilmu, mulai dari filsafat, psikologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Peradaban Romawi yang dasar logikanya adalah kekuatan fisik melahirkan manifestasi-manifestasi peradaban militer yang gagah dan kuat, teknologi tempur yang maju, dan lain sebagainya.

Begitu juga peradaban Persia yang dasar logikanya adalah kekuatan dan kemewahan. Manifestasi peradaban yang muncul sangat erat dengan dua logika ini, seperti kastil-kastil megah, tempat-tempat mewah yang berlebihan, dan kekuatan militer yang tangguh. Sedangkan peradaban Islam memiliki dasar logika yang sangat kompleks yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti kemampuan berfikir, kekuatan logika, kerohanian, etika-sosial, dan materi. Kompleksitas dasar logika ini memengaruhi manifestasi peradaban Islam, di mana peradaban Islam sangat kental dengan ilmu pengetahuan, kekuatan militer, kesucian jiwa, dan menjunjung tinggi etika.

5. Perkembangan Peradaban Manusia Berbasis Ashabiyah

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat hidup secara individual mereka tidak akan mampu hidup sendiri, mereka akan saling membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa menjalin dengan beberapa tenaga lain jika ia hendak memperoleh makanan bagi diri dan sesamanya. Dengan berkerja sama kebutuhan manusia dapat terpenuhi.¹⁶ Hal ini memberikan penjelasan bahwa dalam peradaban manusia antar satu komunitas dengan komunitas lain harus bergotong royong dan saling melengkapi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang terciptanya interaksi sosial. Dapat dikatakan bahwa teori yang dibuat oleh Ibnu Khaldun ini menyebutkan sebagai “Umran badawi (*Bedouin culture*) dan “Umran hadhiri (*civic culture*). Jika dikaitkan dengan peradaban dan perkembangan manusia maka teori ashabiyah akan menjadi “peradaban basis komunitas”. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam kedudukannya sebagai individu, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan membutuhkan keterikatan dengan orang lain (*ta’awun*). Manusia dapat menjadi kuat dan hidup apabila melebur diri dalam masyarakat dan menciptakan interaksi sosial di dalamnya. Kesadaran tentang kelemahan tersebut mendorong manusia untuk saling berperan dalam sistem gotong royong dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Perkembangan 'Umran badawi (*Bedouin Culture*) dan 'Umran hadhiri (*Civic Culture*)

Adapun ashabiyah dalam perkembangan peradaban manusia yang berbasis komunitas tradisional/desa dan modern/kota telah disebutkan oleh Ibnu Khaldun sebagai berikut.

a) Peradaban Komunitas Tradisional /Desa (*Bedouin Culture*)

Dalam komunitas desa produksi yang paling sederhana adalah pertanian. Pekerjaan ini, menurut Ibnu Khaldun, tidak memerlukan ilmu dan ia merupakan penghidupan orang-orang yang tidak punya dan orang-orang desa. Oleh karena kegiatan bertani ini jarang dilakukan orang-orang kota pada umumnya. Penilaian Ibnu Khaldun ini setidaknya disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, tidak membutuhkan ilmu yang luas dan dalam. Karena siapa saja dapat menjadi petani tanpa harus sekolah khusus pertanian. Analisa ini diutarakan karena pada saat itu kondisi masyarakat masih sangat sederhana dan belum ada fakultas pertanian seperti sekarang ini. Kedua, jika ditelaah dari segi besarnya pendapatan, para petani pada umumnya berpenghasilan rendah dibanding masyarakat kota. Ketiga, para petani diwajibkan membayar pajak. Ibnu Khaldun berpandangan orang-orang yang membayar pajak adalah orang yang lemah, sebab orang-orang yang kuat tidak mau membayar pajak. Alasan terakhir adakah bersifat kondisional yang berbeda dengan kondisi zaman modern sekarang ini.

b) Peradaban Komunitas Modern/kota (*Civic Culture*)

Menurut Ibnu Khaldun orang hidup di kota populer dalam membantu kebutuhan komoditi, akan tetapi mereka membutuhkan kekuatan untuk melindunginya. Perlindungan itu bisa diperoleh dari orang-orang yang dekat dengan raja atau penguasa dan komunitas tertentu dimana raja atau penguasa akan menghormati dan menghargainya. Dalam hal ini peradaban basis komunitas kota tertentu di mana yang memiliki banyak modal akan meminta bantuan komunitas lainnya untuk melobi raja agar mendapat perlindungan. Dengan ini bahwa komunitas di kota tidak ada saling kerja sama atau gotong royong sikap saling membantu antar sesama yang ada di sekitarnya, hanya karena ingin pendapatan perhatian dan perlindungan dari raja. Menurutnya, jika kota-kota dan kota besar tertentu mengungguli kotakota lain dalam aktifitas untuk mencari

perlindungan kepada raja yang menyebabkan mereka tidak saling terikat dengan masyarakat di dekatnya. Maka bagi Ibnu Khaldun bentuk kegiatan ini memiliki beberapa faktor, di antaranya adalah perdagangan dan industri Ibnu Khaldun berpandangan bawa para petani di komunitas desa atau “Umran badawi (*Bedouin culture*) menghasilkan hasil pertanian yang melimpah dari yang mereka butuhkan. Oleh karena itu mereka menukar kelebihan produksi mereka dengan produk-produk lain yang mereka perlukan. Dari sinilah timbul *ashabiyah* dalam perdagangan(dijarah). Jadi, pekerjaan perdagangan ini secara kronologis muncul setelah adanya produksi pertanian dari “umran badawi (*Bedouin culture*). Seperti telah dijelaskan, perdagangan adalah upaya produktifitas modal yaitu dengan membeli barang- barang dan berusaha menjualnya dengan harga tinggi untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan dalam perindustrian, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa faktor industri menduduki peringkat budaya yang tinggi dan lebih luas ketimbang pertanian dan perdagangan. Perindustrian pada umumnya memiliki daerah atau kawasan khusus di perkotaan di mana penduduknya lebih mencapai peringkat kebudayaan yang lebih maju. Hal ini menjadi perhatian masyarakat industri karena mereka berada dalam zona kebutuhan atau menjadi masyarakat konsumtif.

Simpulan

Ibn Khaldun merupakan seorang tokoh politisi besar dan termasuk dalam salah satu tokoh pemikir Arab-Islam yang terbaik di sepanjang masa. Beliau menjadikan sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang sentiasa hidup dan relevan dengan membawa konsep „*umran* untuk tujuan memakmurkan kehidupan tamadun manusia. Pencapaian *umran al-`alam* “kemakmuran sejagat” yang dihasratkan oleh Ibn Khaldun itu mestilah memenuhi tiga syarat. Pertama, masyarakat beragama dan berakhlak mulia. Kedua, masyarakat yang bekerjasama dan bersatu padu. Ketiga, pemerintahan yang adil dan saksama. Ilmu `umran atau teori `umran mempunyai dimensi serta visi dan misi yang sangat luas dan melihat jauh ke hadapan lebih jauh dari visi dan misi ilmu sosiologi atau ilmu tamadun yang disampaikan oleh pengkajian mukadimah Ibn Khaldun sebelum ini. Oleh karena itu maka wajarlah istilah “`umran” dijadikan wadah pembangunan ummah. Oleh karena itu

ia menjelaskan fenomena ashabiyah di dalam masyarakat dan negara. Dari kajian ini dapat secara historis bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang ashabiyah jauh mendahului para sarjana intelektual lain pada zamannya

Referensi

- Kamaruzaman, A. F., & AKRASHASURTAHMAN, N. (2021). Genesis Falsafah Sejarah Islam dan Perkembangannya Pasca Ibn Khaldun. *Islamiyyat:International Journal of Islamic Studies*, 43(1).
- Khoiruddin,K.(2016).AnalisisTeori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ASAS*, 8(1).
- Diajukan, S., Ushuluddin, F., Uin, F., Ampel, S., Oleh, D., & Nim, F. (2022). *ALQURAN DAN PERADABAN MANUSIA PERSPEKTIF MUHAMMAD SAI > D RAMAD} A > N AL-BU > T} I*
- Sudrajat, A., & Barat, S. A. (2009). *No Title*.1–16.
- Sujati, B. (2018). Konsepsi Pemikiran Filsafat Sejarah Dan Sejarah Menurut Ibnu Khaldun. *Jurnal Tamadun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 6(2), 127–148. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i2.3521>
- Syamsuri Akil. (2020). PERADABAN INFRASTRUKTUR IBNU KHALDUN (Perspektif Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia). *Rausyan Fikr*, 16(2), 213–241. Mahayudin Hj Yahaya.2011. „Umran al Alam dari Perspektif Ibn Khaldun: Suatu anjakan paradigma. *International Journal of West Asian Studies* 3(1): 1-27.
- MahayudinHjYahaya.2013. „Umran dan Aplikasinya di Alam Melayu. *Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu* 6(1): 1-33
- Riyadi, A. K. (2018). Kontroversi al Umran: ibn Khaldun dan perdebatan klaim kebaruan. *Wawasan-JurnalIlmiah Agama dan Sosial Budaya*, 3(1), 48-66.
- Yahaya, M. H., & Darussalam, N. B. (2011). “Umran al-„Alam dari Perspektif Ibn Khaldun: Suatu Anjakan Paradigma. *International Journal of West Asian Studies*, 3(1), 1-28.